



**OPTIMALISASI FUNGSI KOMISI KEJAKSAAN DALAM
PENANGANAN PENGADUAN TERHADAP
KINERJA JAKSA**

TESIS

MURNI YANTI
1720622094

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
2021

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri, dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan secara benar.

Nama : Murni Yanti

NRP : 1720622094

Tanggal :

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan saya ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 2021

Yang Menyatakan,



Murni Yanti

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Murni Yanti

NRP : 1720622094

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

OPTIMALISASI FUNGSI KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA JAKSA

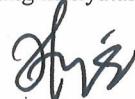
Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalty ini Universitas Negeri Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal:

Yang menyatakan,



Murni Yanti

PENGESAHAN

Tesis diajukan oleh:

Nama : Murni Yanti
NRP : 1720622094
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Optimalisasi Fungsi Komisi Kejaksaan dalam Penanganan Pengaduan Terhadap Kinerja Jaksa



Dr. Abdul Halim, S.H., M.Ag
Ketua Penguji



Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH
Penguji II



Dr. Wicipro Setiadi, SH., MH
Penguji II/Pembimbing



Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LL.M
Ka. Prodi

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 24 Juli 2021

OPTIMALISASI FUNGSI KOMISI KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP KINERJA JAKSA

MURNI YANTI

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk memahami pelaksanaan fungsi pengawasan Komisi Kejaksaan dalam penanganan pengaduan yang dirasakan belum optimal mengingat ketentuan Pasal 4 huruf a dan b Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2011 Tentang Komisi Kejaksaan (“**PP 18/2011**”) sebagai dasar Komisi Kejaksaan melaksanakan tugas yang diatur Pasal 3 PP 18/2011 menimbulkan multitafsir. Pasal 4 huruf a PP 18/2011 mengatur dalam melaksanakan tugasnya Komisi Kejaksaan berwenang untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat, namun belum diatur secara jelas sejauhmana kewenangan Komisi Kejaksaan dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat, sementara Pasal 4 huruf b mengatur kewenangan Komisi Kejaksaan untuk meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Ketentuan Pasal 10 PP 18/2011 menyebutkan antara lain Komisi Kejaksaan berwenang mengikuti gelar perkara terhadap kasus menarik perhatian publik. Komisi Kejaksaan perlu melakukan upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya dalam menangani pengaduan, antara lain menggunakan konsep teori hukum progresif yang dipopulerkan Satjipto Raharjo bahwa penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan, melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam dari undang-undang/hukum dalam arti luas. Hukum progresif seyogyanya juga diterapkan dalam pengawasan preventif Komisi Kejaksaan yaitu mengikuti gelar perkara penting yang ditangani Komisi Kejaksaan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi agar Komisi Kejaksaan lebih dirasakan kehadirannya.

Kata Kunci: Komisi Kejaksaan, Penanganan, Pengaduan, Progresif

***OPTIMIZATION OF PROSECUTORS COMMISSION'S FUNCTION IN
DEALING WITH COMPLAINT ABOUT PROSECUTORS' PERFORMANCE***

MURNI YANTI

ABSTRACT

This research was conducted to understand the implementation of the supervisory function of the Prosecutor's Commission in handling complaints which were felt not optimal yet, considering the provisions of the article 4 letters a and b of Presidential Regulation No. 18 of 2011 concerning the Prosecutor's Commission to carry out the tasks regulated in Article 3 of PP 18/2011, has caused multiple interpretations. Article 4 letter a of PP 18/2011 stipulates that in carrying out its duties the Prosecutor's Commission has the authority to receive and follow up on public complaints, but it has not been clearly regulated the extent of the authority of the Prosecutor's Commission in following up on public complaints, while article 4 letter b regulates the authority of the Prosecutor's Commission to forward reports or complaints to the Attorney General for follow up. The provisions of article 10 of PP 18/2011 state that, among other things, the Prosedutor's Commission has the authority to follow the proceedings of cases that attract public attention. The Prosecutor's Commission needs to make efforts to optimize the implementation of its duties in handling compalints, including using the concept of progresesive legal theory popularized by Satjipto Raharjo that progressive law enforcement is carrying out the law not just black and white words from regulations, but according to the spirit and deeper meaning of the law in the broadest sense. Progressive law should also be applied in the preventive supervision of the Prosecutor's Commission namely following the titles of importanat cases handled by the Prosecution's presence is more felt.

Keyword: Prosecution Commission, handling, complaints, Progresive

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT serta shalawat dan salam selalu tercurah kepada Baginda Rasullullah SAW. Tiada daya dan upaya kecuali atas berkah, rahmat dan pertolonganNya penulis berhasil menyelesaikan Proposal Tugas Akhir dengan judul “**Optimalisasi Fungsi Komisi Kejaksaan dalam Penanganan Pengaduan Terhadap Kinerja Jaksa**”.

Penulisan tesis ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta serta mencapai gelar Magister Hukum periode tahun 2021. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Dr. Erna Hernawati, Ak, CPMA, CA, selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
2. Dr. H. Abdul Halim, M. Ag Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
3. Dr. Beniharmoni Harefa, SH., LLM Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;
4. Dr. Handoyo Prasetyo, SH., MH selaku Dosen Pengaji.
5. Dr. Wicipto Setiadi, SH., MH., atas kesabaran dan memberikan petunjuk yang bermanfaat bagi penulis;
6. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan;
7. Suamiku Arif Budi Haryanto, SH, anak-anakku Naifahra Artanti dan Faiz Alghiffary atas dukungan spirituial dan materiil serta doa yang tiada henti;
8. Orangtuaku, Ibu Siti Maemunah (almh), Bapak Ahyar, Ibu Maryam, Bapak Wagimin (alm), semua keluarga kerabat atas doa dan dukungannya;
9. Teman-teman seperjuangan di Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta;

10. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan tesis ini.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, serta masih banyak kekurangannya, mengingat saya sebagai manusia yang memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu penulis senantiasa akan menerima kritik dan saran dari semua. Akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan tesis ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, 16 Juli 2021
Penulis,

MURNI YANTI, SH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. <i>Literature Reviews</i>	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Kerangka Konseptual.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Jenis dan Sumber Data.....	17
4. Cara Pengumpulan Data.....	19
5. Teknis Analisis Data.....	19
BAB II	
HUKUM PROGRESIF DAN KAITANNYA DENGAN TUGAS PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN.....	21
A. Prinsip <i>Check and Balance</i> sebagai Salah Satu Perwujudan Asas Negara Hukum dan Negara Demokrasi.....	21
I. Kewenangan sebagai Dasar Legitimasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Kenegaraan.....	25
II. Prinsip <i>Checks And Balances</i>	28
B. Makna Hukum Progresif dalam penegakan hukum di Indonesia.....	32
C. Peraturan Kebijakan dalam Penanganan Pengaduan Masyarakat.....	35
BAB III	
KOMISI KEJAKSAAN SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS EKSTERNAL.....	37
A. Ide Pembentukan Komisi Kejaksaan.....	37
B. Tugas dan wewenang Komisi Kejaksaan.....	41
C. Contoh kasus penanganan pengaduan yang menarik perhatian publik oleh Komisi Kejaksaan.....	45

D. Trend Penanganan Pengaduan Masyarakat Terkini oleh Komisi Kejaksaan.....	48
BAB IV	
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Penerapan hukum Progresif dalam upaya optimalisasi fungsi Komisi Kejaksaan dalam penanganan pengaduan.....	51
B. Konsep Ideal Penanganan Pengaduan Komisi Kejaksaan.....	58
C. Konsep Ideal Komisi Kejaksaan sebagai Lembaga Pengawas Eksternal.	60
BAB V.....	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
BIODATA TERBARU.....	71